

## **Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan**

*Rafena Andi Ningsih, Yusniar Harahap, Ris Artalina Tampubolon*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara, Indonesia*

### KEYWORDS

Peranan, Kepala Desa, pembangunan infrastruktur

### CORRESPONDENCE

*Rafena Andi Ningsih*

E-mail address: [rafena@gmail.com](mailto:rafena@gmail.com)

### A B S T R A C T

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peranan kepala desa sebagai pemimpin desa. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat peranan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi terhadap sejumlah informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Siamporik Dolok dilihat dari fungsinya sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator sudah cukup baik. Untuk faktor penghambat pembangunan infrastruktur ada beberapa hal yang ditemukan yaitu masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi serta keterlambatan dana sebagai anggaran pembangunan dalam pencairannya. Besar harapan peneliti kepada pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan terhadap infrastruktur di desa, juga aktif dalam kegiatan desa serta mengajak masyarakat untuk ikutserta dalam pelaksanaan pembangunan.

### LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat desa saat ini, yang mana kegiatan ini tidak lepas dengan pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas otonomi daerah, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri. Maka diberilah amanah kepada kepala pemerintah desa untuk meningkatkan dan mengelola otonomi daerah seperti melaksanakan proses pembangunan infrastruktur di desa.

Proses pembangunan juga termasuk dalam aspek partisipasi masyarakat yang diantaranya meliputi mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah, yang mana dilaksanakan mulai dari tingkat lorong

sampai pada musyawarah desa, kepala desa harus melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, serta dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam merealisasikan tujuan dari pembangunan desa segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa juga disebut sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang diharapkan mampu

**Attribution-ShareAlike 4.0 International.** Some rights reserved

menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat kearah yang sejahtera adil, tentram, aman, dan damai.

Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mempercepat pembangunan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan kepala desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut maka pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang pastinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kita sebagai masyarakat tentunya mengharapkan desa yang tumbuh dan berkembang dengan maju dengan melakukan serta menyelenggarakan pembangunan infrastruktur atas dorongan dari kepala desa dan pemerintah daerah. Kemudian di sebutkan dalam pasal 78 tentang peranan kepala desa dalam implementasi undang-undang desa, khususnya dalam pembangunan infarastruktur.

Maka peranan kepala desa sangatlah penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa serta mengajak masyarakat dalam pembangunan tentunya akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut tentulah antara pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama.

Pada peraturan pemerintahan (PP) nomor 11 tahun 2019 tentang pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan dana desa. Sehingga memberi amanah kepada kepala pemerintah desa untuk menyusun program pembangunan infrastruktur. Serta mengadakan Forum perencanaannya disebut sebagai musyawarah desa (musdes) dan dibantu oleh badan permusyawaratan desa dan karang taruna. Melalui melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur. Hakekatnya tujuan pembangunan infrastruktur desa adalah untuk meningkatkan konektivitas, akseibilitas, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Seiring dengan adanya peranan kepala desa dalam menjalankan kewajiban salah satunya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dihadapi kepala desa dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di

wilayahnya. Masyarakat yang kurang partisipasi kemudian, persoalan pembebasan lahan masih menjadi faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur, Proses negosiasi dengan pemilik lahan seringkali memakan waktu lama sehingga menghambat kelancaran proyek.

Demikian pula halnya dengan Desa Siamporik Dolok yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dimana desa tersebut memiliki mayoritas mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun. Tentulah dibutuhkan kondisi infrastruktur yang baik dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan itu nantinya. Yang dimana di Desa Siamporik Dolok ada beberapa jalan yang perlu di perbaiki, menambahi fasilitas kebutuhan di desa bagi masyarakat setempat juga meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berjangka panjang. Sehingga Hal ini tidak terlepas dari peranan Kepala Desa Siamporik Dolok sebagai fasilitator dalam pembangunan dan kerja sama antar kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa.

Peranan kepala desa di Desa Siamporik Dolok dalam perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan pengawasan pembangunan desa menjadi hal yang penting mengingat infrastruktur pemerintah desa yang masih terbatas dan belum maksimal. Maka dari itu kepala desa, badan permusyawaratan desa dan karang taruna berkoordinasi untuk melaksanakan musyawarah desa guna mempercepat pembangunan infrastruktur, juga mengajak masyarakat untuk ikutserta dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## **TINJUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peranan**

Menurut Soerjono Soekanto (2022:212-213) mendefinisikan peranan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Peranan menjadi nyata ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, sehingga peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan juga menentukan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, yang berarti bahwa peranan dapat mempengaruhi akses seseorang terhadap sumber daya, informasi, dan peluang.

Menurut Zulkarnain Nasution (2023:334) menjelaskan bahwa peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap

dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Peranan mencerminkan dinamika sosial yang terjadi dalam interaksi antarmanusia. Pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu, yang berarti bahwa peranan merupakan suatu konsep yang kompleks dan terdiri dari berbagai aspek.

Menurut Narwoko & Suyanto (2023:160) peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang di sekitarnya yang berhubungan dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Menurut Horton & Hunt (2021:118) peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peranan ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya.

### **Pemerintahan Desa**

Menurut Soemantri (2022:7-12) mendefinisikan pemerintahan desa sebagai lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan dan pemerintah desa sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Josef Riwo Kaho (2010:84) pemerintahan desa adalah pengelolaan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini mengacu pada aktivitas administrasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan ditingkat desa.

Menurut Nurcholis (2023:45-52) pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintahan desa adalah suatu proses pengelolaan yang melibatkan masyarakat desa dan pemerintah. Proses ini melibatkan penggabungan usaha-usaha masyarakat desa dengan usaha-usaha pemerintah. Pemerintahan desa memerlukan kerja sama yang efektif antara masyarakat desa dan pemerintah.

### **Kepala Desa**

Menurut Ndraha (2021:152) kepala desa adalah pemimpin formal yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Didik G.Suharto (2022:87-92) kepala desa merupakan pemimpin formal yang menjalankan fungsi representasi masyarakat desa, memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan strategi desa, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sadu Wasistiono (2021:31-37) mengungkapkan bahwa kepala desa berperan sebagai pemimpin transformasional yang harus mampu menginspirasi perubahan, membangun visi bersama, dan mengembangkan inovasi dalam pembangunan desa. Menurutnya, kepala desa harus mampu mengelola sumber daya desa secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa juga memiliki peran strategis dan multidimensi dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Peran ini mencakup berbagai aspek dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan, yang kesemuanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

### **Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut Yusnani Hasyimzoem (2022:203-208) badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa sebagai representasi dari elemen masyarakat desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:77-78) Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan permusyawaratan desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan dipilih secara demokratis oleh penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Sebagai mitra kerja pemerintah desa, BPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan kepala desa dalam struktur pemerintahan desa, dimana kedua lembaga ini saling mengisi dan saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa, serta menjamin terlaksananya pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

### **Karang Taruna**

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI nomor. 77/HUK/ (2010:3-4) Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.

Menurut Soetomo (2020:213-215) karang taruna adalah lembaga sosial yang berfungsi sebagai wahana partisipasi generasi muda dalam pembangunan sosial dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan penanganan masalah sosial.

Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi produktif, pencegahan masalah sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pembangunan**

Menurut Jeffrey Sachs (2022:33-36) pembangunan berkelanjutan adalah proses perubahan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Menurut Michael Todaro & Stephen Smith (2020:16-20) Pembangunan adalah proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial, tidak hanya peningkatan pendapatan dan produksi. Todaro dan Smith menekankan bahwa pembangunan sejati membutuhkan perubahan struktural dan institusional yang mendasar. Ini termasuk reformasi

dalam sistem produksi, distribusi kekayaan, struktur kelembagaan, norma sosial, sikap masyarakat, dan bahkan nilai-nilai budaya.

Pembangunan merupakan aspek yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan merupakan aspek yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan mengintegrasikan tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwa kebutuhan

Meningkatkan pembangunan merupakan serangkaian upaya sistematis dan terencana yang dilakukan untuk memperbaiki, memperluas, dan mengoptimalkan berbagai aspek pembangunan baik fisik maupun non-fisik dalam suatu wilayah. Proses ini mencakup penguatan kapasitas, peningkatan kualitas, perluasan jangkauan, dan pengembangan infrastruktur yang sudah ada serta pembangunan fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Upaya meningkatkan pembangunan dilakukan melalui perencanaan strategis, pengalokasian sumber daya yang efektif, implementasi program yang terarah, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai secara optimal.

### **Infrastruktur**

Menurut Grigg dan Fontane (2021:12-15) infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, infrastruktur tidak hanya mencakup fasilitas fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, tetapi juga meliputi ketersediaan dan fungsi dari sistem-sistem yang mendukung kehidupan modern seperti jaringan listrik, pasokan air bersih, serta pengolahan limbah.

Menurut Stone (2023:35-39) infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk,

memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempermudah akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditinggali.

Menurut Hansen (2021:41-45) infrastruktur adalah investasi jangka panjang dalam bentuk aset fisik, seperti fasilitas transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi, yang esensial untuk perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Menurut Aschauer (2022:76-82) pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang dalam berbagai struktur fisik dan modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan konektivitas dan aksesibilitas dalam masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pengembangan suatu negara karena menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, sistem pengairan, dan telekomunikasi tidak hanya memfasilitasi mobilitas orang dan barang dengan lebih efisien, tetapi juga membuka akses terhadap layanan dasar, meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016:15) mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang

berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik pengambilan data dengan triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil yang diperoleh dari menggunakan penelitian kualitatif sendiri adalah menekankan pada makna dari generalisasi.

Menurut Creswell dan Poth (2021:147-148) penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Penelitian ini melibatkan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumen, dengan fokus pada interpretasi mendalam terhadap fenomena

Menurut Conny R. Semiawan (2021:59) Penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (data) secara sistematis dan logis untuk tujuan tertentu. Penelitian juga merupakan sebuah cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Penelitian kualitatif menggunakan prosedur ilmiah yang berfokus pada pemahaman mendalam, interpretasi, dan konteks. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga tentang memberikan makna pada data tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, serta lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dapat berupa :tes, angket, kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dilihat sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*) kuisisioner (aneken

dokumentasi dan cabangannya keempatnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, kuisioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Penelitian dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Penelitian tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Desa Siamporik Dolok dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur

#### 2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informan yang terkait. Menurut Yusuf (2014:372) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk untuk tujuan pencatatan dan referensi. Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada informasi dari dokumen, buku, jurnal, surat kabar, laporan kegiatan dan lain-lain.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling* (pengambilan sampel secara disengaja). Menurut Sugiyono (2016:85-86) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Menurut Afrizal (2019:139) penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Menurut Spradley (2007:39-40) informan penelitian adalah pembicara asli (*native speaker*) yang merupakan sumber informasi bagi etnografer. Informan sebaiknya dipilih dari mereka yang menguasai bahasa setempat dan memahami dengan baik budaya yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi Informan kunci adalah Kepala desa dan perangkat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan informan tambahan adalah masyarakat yang ada di Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

### Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2016:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data kualitatif merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Miles dan Huberman (2014:31-33) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. teknik analisis data yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matrik, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Siamporik Dolok, yang berada di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mayoritas masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan terhadap infrastruktur seperti jalan, pengairan, dan fasilitas umum menjadi sangat penting untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pembangunan infrastruktur di desa ini masih memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam perbaikan jalan desa, penguatan sistem pengairan, serta peningkatan fasilitas umum.

### Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peranan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Siamporik Dolok dapat dianalisis melalui tiga peran utama, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator.

#### 1. Peranan Kepala Desa sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Kepala Desa berperan dalam:

- a. Menyediakan ruang musyawarah desa (Musdes) untuk membahas prioritas pembangunan.
- b. Mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur.
- c. Mengkoordinasikan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Karang Taruna dalam perencanaan pembangunan.
- d. Mengupayakan pencairan dana desa sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam praktiknya, kepala desa telah memfasilitasi pembangunan jalan desa dan

perbaikan fasilitas umum melalui musyawarah bersama masyarakat. Peran ini sudah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat keterbatasan partisipasi masyarakat.

#### 2. Peranan Kepala Desa sebagai Motivator

Sebagai motivator, Kepala Desa berperan dalam:

- a. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong.
- b. Menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pembangunan infrastruktur.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dari hasil penelitian, kepala desa telah berupaya memberikan motivasi melalui sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal, terutama dalam pelaksanaan fisik pembangunan.

#### 3. Peranan Kepala Desa sebagai Mobilisator

Sebagai mobilisator, kepala desa:

- a. Menggerakkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan.
- b. Mengkoordinasikan perangkat desa dan lembaga desa dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
- c. Menjalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten terkait dukungan pembangunan.

Peran ini terlihat dari adanya koordinasi antara kepala desa, BPD, dan Karang Taruna dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan fasilitas desa. Kepala desa juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengajuan kebutuhan pembangunan.

### Hambatan dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Siamporik Dolok, yaitu:

#### 1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Sebagian masyarakat kurang aktif dalam kegiatan pembangunan, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pembangunan dan kurangnya semangat gotong royong.

2. Permasalahan Pembebasan Lahan  
Proses negosiasi dengan pemilik lahan seringkali memakan waktu lama. Hal ini menjadi kendala dalam pembangunan jalan atau fasilitas umum yang membutuhkan perluasan area.
3. Keterlambatan Pencairan Dana  
Dana desa sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan terkadang mengalami keterlambatan pencairan, sehingga pelaksanaan proyek menjadi tertunda.

### Pembahasan

Jika dikaitkan dengan teori peranan menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. Kepala desa sebagai pemimpin formal memiliki kewajiban menjalankan fungsi kepemimpinan dalam pembangunan desa.

Dalam konteks penelitian ini, peranan kepala desa di Desa Siamporik Dolok sudah sesuai dengan teori kepemimpinan organisasi yang mencakup:

1. Interpersonal role (peranan antar pribadi)
2. Leader (motivator)
3. Liaison (mobilisator)

Secara umum, peranan kepala desa sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena adanya hambatan struktural dan partisipatif.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan tidak dapat berjalan maksimal meskipun kepala desa telah menjalankan fungsinya dengan baik.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Siamporik Dolok, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa sangat vital dan strategis.

1. Peranan kepala desa sebagai fasilitator terhadap meningkatkan pembangunan infrastruktur, memotivasi masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan, dan sebagai penggerak terlaksananya pembangunan infrastruktur desa.
2. Hambatan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Siamporik Dolok yakni masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemudian persoalan pembebasan lahan masih menjadi faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur, Proses negosiasi dengan pemilik

lahan seringkali memakan waktu lama sehingga menghambat kelancaran proyek pembangunan.

### DAFTAR PUSTAKA

Aschauer, David A. (2022). *Infrastructure Investment and Economic Growth: A Survey of Macroeconomic Perspectives*. Chicago: University of Chicago Press. (hlm. 76-82)

Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.(hal:41-48).

Denzim,N.K.,& Lincoln, Y.S. (Eds.).(2021). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.).SAGE Publications.hal:3

Estache, Antonio & Fay, Marianne. (2024). *Current Debates on Infrastructure Policy and Development*. New York: Oxford University Press. (hlm. 45-51)

Grigg, N.& Fontane,D. (2021). *Infrastuktur Systems Management & Optimization*.New York: McGraw-Hill.(hal:12-15)

Hansen, Niles M. (2021). *Infrastructure and Regional Development*. New Jersey: Princeton University Press. (hlm. 41-45)

Hasyimzoem,Yusnani.(2022).*Dinamika Hukum Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa*.Jakarta:Rajawali Pers.(hal.203-208)

Horton, Paul B. & Chester L. Hunt. 2021. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, hlm. 118)

Kuncoro, Mudrajad. (2020). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. (hlm. 42-45)

Levinson, Daniel J. 2022. *Role, Personality, and Social Structure*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, Vol. 58, hlm. 174-176)

Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.hal: 132-135

Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. 2023. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 160)

Ndraha, T.(2021). *Sistem Pemerintahan Desa Kontemporer: Kajian Kepemimpinan dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT Rineka Cipta,hal:152

Nurcholis, Hanif.(2023). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Erlangga.hal:45-52

Sachs, J. D.2022. *The Age of Sustainable Development* (Edisi Terbaru). New York: Columbia

University Press.hal 33-36

Sadu,Wasistiono (2021). S. Kepemimpinan Transformasional dalam Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia.hal:31-37

Semiawan,Conny R. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.Jakarta: Grasindo.hal:59

Soekanto, Soerjono. 2022. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 212-213)

Soetomo. (2020). Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (hlm. 213-215)

Stone, A.2023. Contemporary Infrastructure Development: Theory and Practice. Cambridge: Harvard University Press.hal:35-39

Sugiyono,(2023). Metode penelitian kualitatif.Bandung:Alfabeta.hal:95

Sukmadinata, Nana Syaodih`. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (hal. 52)

Todaro, M. P., & Smith, S. C.2020. Economic Development (Edisi ke-13). London: Pearson Education.hal:16-20

Torresi, Gianpiero. (2024). Economics of Infrastructure: Theory and Policy. Oxford: Oxford University Press. (hlm. 23-28)

Wasistiono,& Tahir (2021).S. Kepemimpinan Transformasional dalam Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia.hal:56

Widjaja, HAW. (2022). \*Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (hal. 18-23)

Yin,R.K.(2011).Qualitative Research from Start to finish.New York: The Guilford Press.

Yusuf, A. Muri. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.hal:372

Zulkarnain.(2023) Struktur social dan dinamika masyarakat.Jakarta,hal:334